KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi V Nggak Sreg Disebut Komisi Basah
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Komisi V Nggak Sreg Disebut Komisi Basah

ANGGOTA Komisi V DPR Saderastuwati mengaku geregetan melihat performa mitra-mitra di komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, cuaca serta pencarian dan pertolongan. Di satu sisi berusaha memperjuangkan anggaran mitra agar sesuai kebutuhan, sementara kinerja yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Ironisnya, Komisi ini kerap disebut sebagai komisi basah.

Hal tersebut dilontarkan Saderastuwati dalam rapat kerja bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) di Ruang Komisi V DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, performa beberapa mitra Komisi V tidak sesuai ekspektasi. Dia lalu menyoroti BMKG yang menurutnya lamban dalam mengeluarkan laporan ter-update terhadap iklim dan cuaca kepada masyarakat. Justru laporan cuaca yang dikeluarkan BNPB jauh lebih cepat padahal dukungan anggaran ke BMKG cukup besar.

"Untuk BMKG, kenapa lebih duluan BNPB untuk menyampaikan peringatan iklim dan cuaca dibanding BMKG? apakah tugas dan fungsinya mau diambil alih," heran dia.

Menurut politisi perempuan PDI Perjuangan ini, laporan cuaca ini memang sesuatu yang sederhana tapi tidak bisa disepelekan. Sebab informasi cuaca dan iklim ini sangat penting terutama bagi petani yang saat ini tengah berjuang meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

"Kalau informasi datang terlambat, petani kita akan kekurangan dan kegagalan panen. Tolong BMKG lebih cepat dan jangan sampai ada tumpang tindih. Kalau perkiraannya sama sih tidak apa-apa, tapi bagaimana kalau beda? Masyarakat pastinya akan bingung," katanya.

Ditegaskan dia, Komisi V sudah barang tentu akan memperjuangkan semua anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kinerja masing-masing mitra. Namun dia meminta semua mitra baik BMKG, Badan SAR Nasional, dan BPWS untuk meningkatkan performanya.

"Kami tidak enak-enak di sini. Kami selalu menjadi bahan omongan. Banyak yang bilang Komisi V ini komisi basah. Entah basah kuyup karena hujan atau bagaimana," katanya.

Anggota Komisi V DPR lainnya, Nur Yasin juga menyoroti buruknya kinerja BPWS, yang merupakan lembaga non struktural yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu (Surabaya-Madura). DPR merasa kinerja BPWS selama ini buruk. Jika performanya tak kunjung membaik, dia usul agar yang dibentuk sejak 2008 ini dibubarkan saja atau dilebur ke salah satu direktorat jendral di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Untuk BPWS saya rasa pantas dibubarkan karena tidak fokus. Selama ini arah pembangunannya ke mana karena sektor pariwisata saja tidak kena. Kalau Sumba kan jelas, pariwisatanya memang bisa dijual. Tapi kalau Madura apa, industrinya apa?" Nur Yasin dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR, Badan SAR Nasional, BPWS dan Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), kemarin.

Menurut dia, harusnya BPWS fokus pada sektor yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Jawa Timur. Namun menjadi masalah karena BPWS ini tugas BPWS ini justru fokus pada pembebasan lahan sementara untuk masalah pembebasan lahan ini di Madura bisa terbilang sangat sulit.

"Kalau nanti penduduk digusur, mau digusur ke mana karena Madura ini padat. Itu juga perlu dipikirkan, memberi alternatif kepada msyarakat. Jangan Cuma pmbebasan lahan," katanya.

Masyarakat Jawa Timur, sambung Yasin, sebenarnya banyak menaruh harapan kepada BPWS ini. Hasil kunjungannya ke berbagai wilayah di Jawa Timur dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat disana, mereka meminta dukungan agar pembangunan di Jawa Timur bisa lebih terarah. "Disana minta dukungan ke Jatim jangan sampai (BPWS) dibubarkan namun harus fokus dan harus benar," katanya. ■ KAL